

Analisis Flypaper Effect dan Kemampuan Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia

Farhan Pramudya¹, Ali Anis²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: fpramudya8@gmail.com, alianis2911@yahoo.com

Info Artikel

Diterima:

15 November 2024

Disetujui:

2 Desember 2024

Terbit daring:

16 Desember 2024

DOI: -

Sitasi:

Pramudya, F & Anis, Ali (2024). Analisis Flypaper Effect dan Kemampuan Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia

Abstract:

This study aims to determine the effect of: (1) Local revenue per capita on regional expenditure kabupaten/kota in Indonesia. (2) Unconditional grant per capita on district/city spending in Indonesia. (3) Previous year regional expenditure per capita on regional expenditure. (4) PAD per capita, unconditional grant per capita, and previous year's regional expenditure per capita jointly affect district/city spending in Indonesia. (5) To see the flypaper effect phenomenon in districts/cities with a very high fiscal capacity index, high fiscal capacity index, medium, low fiscal capacity index. This type of research is quantitative research with secondary data in the form of panel data, namely a combination of 2017-2021 time series data and cross section data of 508 districts / cities in Indonesia. The analysis technique used is panel data regression analysis. The results showed that: (1) local revenue per capita has a positive and significant effect on district / city regional spending in Indonesia. (2) Unconditional grant per capita has a positive and significant effect on district / city spending in Indonesia. (3) Previous year regional expenditure per capita has a positive and significant effect on district / city regional expenditure in Indonesia. (4) Simultaneously, local own-source revenue per capita, unconditional grant per capita and previous year local expenditure per capita have a positive and significant effect on district/city local expenditure in Indonesia. (5) The flypaper effect phenomenon is found in districts/cities with high, medium, low and very low fiscal capacity indices.

Keywords: Flypaper effect, Fiscal Capacity Index, Local Revenue, Unconditional Grant, Regional Expenditure.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh : (1) Pendapatan asli daerah perkapita terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. (2) Unconditional grant perkapita terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. (3) Belanja daerah tahun sebelumnya perkapita terhadap belanja daerah. (4) PAD perkapita, Unconditional Grant perkapita, dan Belanja daerah tahun sebelumnya perkapita secara bersama-sama mempengaruhi belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. (5) Untuk melihat adanya fenomena flypaper effect pada daerah kabupaten/kota dengan indeks kapasitas fiskal sangat tinggi, indeks kapasitas fiskal tinggi, indeks kapasitas fiskal sedang, rendah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa data panel, yaitu gabungan data time series 2017-2021 dan data cross section 508 Kabupaten/Kota di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pendapatan asli daerah perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. (2) Unconditional grant perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. (3) Belanja daerah tahun sebelumnya perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. (4) Secara simultan pendapatan asli daerah perkapita, unconditional grant perkapita dan belanja daerah tahun sebelumnya perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. (5) Fenomena flypaper effect ditemukan pada kabupaten/kota dengan indeks kapasitas fiskal tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.

Kata Kunci: Flypaper effect, Indeks Kapasitas Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Unconditional Grant, Belanja Daerah.

Kode Klasifikasi JEL: O40, L95, L96

PENDAHULUAN

Flypaper effect merupakan anomali yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggapi transfer dana dari pemerintah pusat. Flypaper effect merupakan situasi yang terjadi ketika pemerintah daerah memilih untuk menggunakan dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), daripada menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengimbangi peningkatan belanja (Maimunah & Akbar, 2008). Fenomena flypaper effect sering terjadi di negara-negara yang menerapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

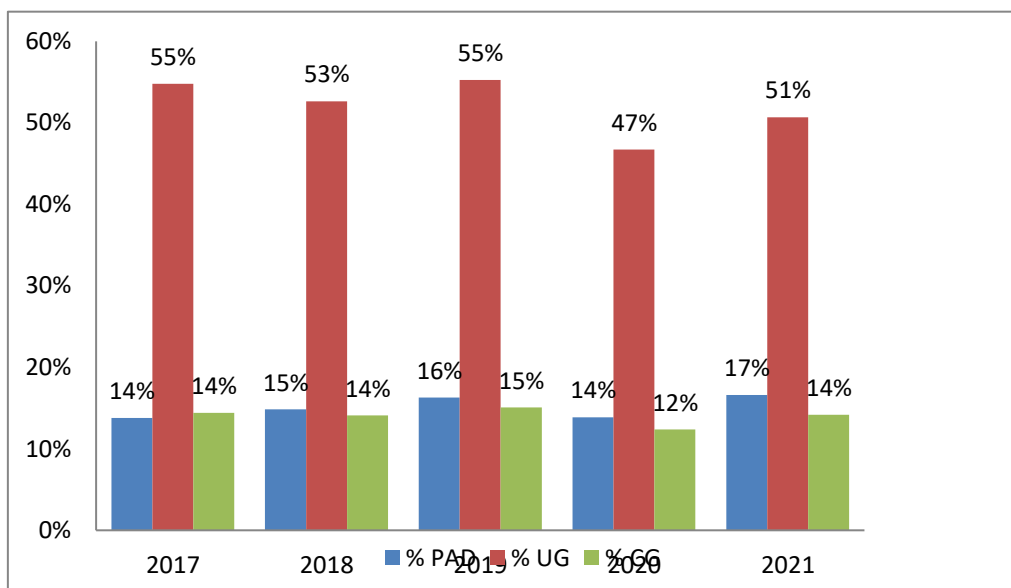
Otonomi daerah telah diterapkan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 2009. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah masing-masing (Kusumadewi & Rahman, 2007). Pelaksanaan otonomi daerah diikuti dengan desentralisasi fiskal, dimana terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam hal mengatur dan mengelola keuangannya. (Proborini Hastuti, 2018) menyatakan bahwa tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan kemandirian daerah. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggali segala potensi yang menjadi sumber penerimaan daerah dan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Tuntutan kemandirian daerah belum terjawab dalam kapasitas daerah. Kemandirian daerah tercermin dari kemampuan daerah dalam memenuhi belanja daerahnya. (Badrudin, 2017) menyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, hibah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Untuk menjamin pemerataan, daerah yang memiliki PAD yang tinggi akan menerima bagian dana perimbangan yang lebih kecil, sedangkan daerah yang memiliki PAD yang rendah akan menerima bagian dana perimbangan yang lebih besar. Besarnya dana perimbangan yang diterima setiap daerah merupakan fungsi dari kapasitas fiskal daerah tersebut.

Dana perimbangan merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dana perimbangan bersifat hibah tanpa syarat (unconditional transfer) dan hibah bersyarat (conditional transfer). Hibah tanpa syarat berarti dana transfer dari pusat diserahkan kepada daerah dalam hal pemanfaatannya. Subsidi tak bersyarat terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Hibah bersyarat, di sisi lain, terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dibagi lagi menjadi DAK fisik dan non-fisik.

Saat ini telah memasuki dua dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Namun dalam implementasinya belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Kemandirian daerah dapat tercermin pada besarnya pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah. Berikut merupakan perbandingan persentase total pendapatan asli daerah dan total dana perimbangan terhadap total belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia 2017-2021.



Gambar. 1 Perbandingan persentase Total PAD, Unconditional Grant (UG), dan DAK terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 2017-2021

Sumber : *djpk.kemenkeu diolah*

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa subsidi tanpa syarat atau transfer tanpa syarat (DAU & DBH) memiliki persentase yang lebih besar dari belanja daerah di kabupaten/kota di Indonesia. Persentase hibah tanpa syarat (UG) terhadap belanja daerah cukup tinggi, melebihi 50%, kecuali pada tahun 2020 yang hanya 47%. Dalam hal ini, persentase DAP terhadap belanja daerah hanya sebesar 14% hingga 17%. Selain itu, hibah bersyarat atau transfer bersyarat (DAK) tidak melebihi 15% selama periode 2017-2021. Persentase UG yang begitu dominan dalam belanja daerah menunjukkan kemandirian daerah yang rendah dan dana transfer yang tidak bersyarat menjadi sumber pendanaan utama belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Rendahnya tingkat kemandirian daerah ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari dua dekade tidak sesuai dengan harapan dan justru menimbulkan ketergantungan pada dana perimbangan. Hal ini mengindikasikan rendahnya kapasitas fiskal kabupaten/kota di Indonesia. Kapasitas fiskal daerah diukur dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, yang terbagi dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Berikut merupakan rata-rata Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 2017-2021.

Tabel 1. Indeks Rata-Rata Kapasitas Fiskal Daerah (2017-2021)

| No | Indeks Rata-Rata KFD (2017-2021) | Rata-Rata(%) | |
|----|----------------------------------|-----------------|---------|
| | | Jumlah Kab/Kota | |
| 1. | Sangat Tinggi | 45 | 8.85 % |
| 2. | Tinggi | 94 | 18.50 % |
| 3. | Sedang | 127 | 25 % |
| 4. | Rendah | 128 | 25.19 % |
| 5. | Sangat Rendah | 114 | 22.44 % |
| | Jumlah | 508 | |

Sumber: *Peraturan Menteri Keuangan (diolah)*

Rata-rata IKFD yang disajikan di atas menunjukkan bahwa dari 508 kabupaten/kota di Indonesia, 45 kabupaten/kota (8,85 %) masuk dalam kategori IKFD sangat tinggi, 94 kabupaten/kota (18,50 %) masuk dalam kategori IKFD tinggi, 127 kabupaten/kota (25 %) masuk dalam kategori IKFD sedang, 128 kabupaten/kota (25,19 %) masuk dalam kategori IKFD rendah, dan 114 kabupaten/kota (22,4 %) masuk dalam kategori IKFD sangat rendah. (Anggi Aulia Rahma, 2018) menyimpulkan dalam studinya bahwa terdapat flypaper effect pada provinsi dengan indeks kapasitas fiskal daerah sedang dan rendah, tetapi tidak pada provinsi dengan indeks kapasitas fiskal tinggi. Berdasarkan temuan penelitian di atas, diasumsikan bahwa dari 508 kabupaten/kota di Indonesia, 369 atau 72 % kabupaten/kota di Indonesia mengalami flypaper effect.

Selain itu, sesuai dengan saran dari penelitian tersebut (Anggi Aulia Rahma, 2018), perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi fenomena flypaper effect berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah pada populasi yang lebih besar, yaitu kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, terdapat pula perbedaan antara (Anggi Aulia Rahma, 2018) dengan penelitian (Sidiq, 2016). (Anggi Aulia Rahma, 2018) yang menganalisis fenomena flypaper effect berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD) menyimpulkan bahwa flypaper effect hanya terjadi pada daerah yang memiliki IKD sedang dan rendah. Sementara itu, (Sidiq, 2016) yang menganalisis flypaper effect pada kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) menemukan bahwa flypaper effect terjadi pada daerah dengan IKK tinggi, IKK sedang, dan IKK rendah.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Fiskal

Menurut Musgrave (1989), pengeluaran pemerintah adalah segala bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu, seperti stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan yang lebih adil. Dalam konteks desentralisasi fiskal, kewenangan pengeluaran publik diserahkan kepada tingkat lokal. Pengeluaran pemerintah daerah disebut belanja daerah. Belanja daerah berasal dari pendapatan daerah dan dana perimbangan pemerintah pusat. Di Indonesia, dana transfer daerah umumnya terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Konsep desentralisasi fiskal memberdayakan daerah untuk menggali potensi daerah dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berimplikasi pada terciptanya kemandirian daerah.

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah cerminan Kemampuan Fiskal Daerah

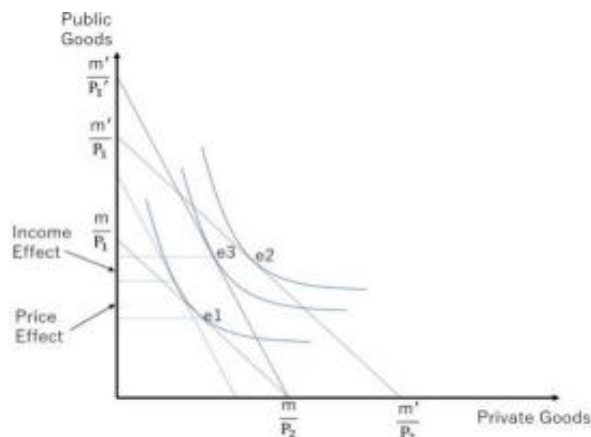
Berdasarkan pasal 1 PMK 116/2021 Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Berikut merupakan klasifikasi indeks kapasitas fiskal daerah.

Tabel 1. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah 2017-2021

| Rentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) | Kategori Daerah | Kapasitas Fiskal |
|---|-----------------|------------------|
| $IKFD < 0,530$ | Sangat rendah | |
| $0,530 \leq IKFD < 0,727$ | Rendah | |
| $0,727 \leq IKFD < 1,053$ | Sedang | |
| $1,053 \leq IKFD < 1,838$ | Tinggi | |
| $IKFD \geq 1,838$ | Sangat Tinggi | |

Sumber : PMK No. 116 Tahun 2021

Model Dasar Flypaper Effect



Gambar 2. Kurva Fiscal Illusion of Intergovernmental Transfer

Sumber: (Munawar Chalil, 2018)

Kurva di atas menunjukkan pengaruh transfer sekaligus terhadap pendapatan. Dalam grafik ini, birokrasi diasumsikan mengikuti preferensi pemilih median. Sebelum transfer, preferensi terbaik dari pemilih median adalah e_1 dengan batasan anggaran sebagai berikut.

$$m = P_1 X_1 + P_2 X_2$$

Di mana m adalah pendapatan rata-rata pemilih, P_1 dan P_2 adalah harga penawaran fiskal dari barang publik dan harga barang privat. X_1 dan X_2 adalah jumlah barang publik dan barang privat. Dalam kasus transfer dana dari pemerintah pusat, efek pendapatan menggeser pendapatan menjadi m' , di mana pengeluaran pemerintah daerah yang baru adalah e_2 . Kondisi ini hanya berlaku jika birokrat mengikuti preferensi pemilih median. Namun, para birokrat lebih memilih untuk mementingkan diri sendiri dengan menyembunyikan transfer antar pemerintah dan melihat harga fiskal dari barang publik, yang dicirikan sebagai berikut:

$$P_j^1 = (G - Z)/G \quad (1)$$

dimana P_j^1 adalah harga pajak yang dirasakan, G dan Z adalah pengeluaran riil pemerintah dan dana transfer. Hal ini menyebabkan preferensi rata-rata pemilih untuk pengeluaran pemerintah daerah bergeser menjadi e_3 . Para pemilih menerima kondisi ini karena mereka menerima penyediaan barang publik yang lebih tinggi tetapi tidak mengetahui jumlah dana transfer yang diterima. Akibatnya, dana hibah dari pemerintah pusat tetap berada di tangan pemerintah daerah, yang dikenal dengan istilah efek kertas kosong (*flypaper effect*). (Munawar Chalil, 2018) menyatakan bahwa jika pemerintah mengikuti preferensi pemilih bentuk linear yang direduksi untuk mengestimasi efek flypaper adalah sebagai berikut

$$G_i = \alpha + \beta_1 z_i + \beta_2 m_i + \epsilon_i \quad (2)$$

Dimana G_i adalah belanja publik oleh pemerintah kabupaten/kota i , Z_i adalah transfer dari pemerintah pusat, dan m_i adalah pendapatan rumah tangga di wilayah yurisdiksi kabupaten/kota i dan ϵ_i adalah error term.

Asumsi untuk menentukan terjadinya flypaper effect dalam penelitian ini difokuskan pada dampak PAD dan transfer tak bersyarat terhadap belanja daerah. Menurut Melo (2002), Maimunah (2006) dan Khairani (2008) dalam Iskandar (2012), flypaper effect terjadi apabila: 1. pengaruh atau nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah dan kedua nilai tersebut sama-sama signifikan; atau

2. pengaruh respon PAD terhadap belanja daerah tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan terjadi flypaper effect.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dan induktif. Data yang digunakan adalah data time series dan data cross section (pooled data atau data panel) dari tahun 2017 sampai 2021. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK Kemenkeu). Selain itu beberapa data yang tidak lengkap disempurnakan dengan data dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini mencakup 508 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan periode waktu 2017-2021. Variabel independen yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah per kapita, *Unconditional Grant* perkapita, belanja daerah tahun sebelumnya per kapita. Serta variabel dependen yaitu belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang diolah menggunakan Eviews 10. Berikut persamaan regresi:

$$BDit = \alpha + \beta_1 PADit + \beta_2 UGit + \beta_3 LAGBDit + \text{eit.} \tag{3}$$

Dimana (BD it), (PAD it), (UG it), (LAGBDit), (E) adalah belanja daerah, pendapatan asli daerah per kapita, Unconditional Grant perkapita, Belanja daerah tahun sebelumnya perkapita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki hubungan antara pendapatan asli daerah, Unconditional grant perkapita, dan belanja daerah tahun sebelumnya perkapita terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Kemudian penelitian ini juga menyelidiki apakah terdapat fenomena flypaper effect berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Indonesia. Dari hasil pengujian yang dilakukan menggunakan program Eviews 10 untuk metode analisis regresi data panel. Hasil estimasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1 (Hasil Estimasi Regresi Data Panel)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 1.128369 | 0.079497 | 14.19377 | 0.0000 |
| PAD | 0.135859 | 0.007313 | 18.57728 | 0.0000 |
| UG | 0.736196 | 0.012621 | 58.33279 | 0.0000 |
| LAGBD | 0.010388 | 0.004278 | 2.428217 | 0.0153 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------|
| R-squared | 0.988524 | Mean dependent var | 6.655567 |
| Adjusted R-squared | 0.985634 | S.D. dependent var | 0.294490 |
| S.E. of regression | 0.035298 | Akaike info criterion | -3.672029 |
| Sum squared resid | 2.522979 | Schwarz criterion | -2.495612 |
| Log likelihood | 5167.133 | Hannan-Quinn criter. | -3.245244 |
| F-statistic | 342.0162 | Durbin-Watson stat | 2.090470 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 10, 2024

Keterangan:(***Signifikan pada level 1%)(**Signifikan pada level 5%)(*Signifikan pada level 10%)

Berdasarkan hasil regresi estimasi regresi data panel pada tabel 1 maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$BD = 1.128369 + 0.135859*PAD + 0.736196*UG + 0.010388*LAGBD..... \quad (4)$$

Berdasarkan persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah perkapita (X1), Unconditional grant perkapita (X2), belanja daerah tahun sebelumnya perkapita (X3), berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia (Y). Kemudian, nilai Prob (F-statistic) sebesar $0.000000 < 0,05$ menunjukkan bahwa setiap variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0.988524 . Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah perkapita, unconditional grant perkapita, dan belanja daerah tahun sebelumnya perkapita memberikan kontribusi sebesar 98% terhadap preferensi belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan 2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Pengaruh PAD perkapita (X1) terhadap belanja daerah (Y) pemerintah kabupaten/kota di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 1, PAD per kapita menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan dengan belanja daerah, yaitu ketika terjadi peningkatan PAD per kapita pada pemerintah daerah Kab/Kota, maka belanja daerah juga mengalami peningkatan. Meskipun PAD per kapita berpengaruh signifikan, namun terdapat ketimpangan antara daerah yang memiliki IKFD sangat tinggi dengan daerah yang memiliki IKFD sangat rendah dalam menghasilkan PAD. Berdasarkan hasil estimasi, IKFD per kapita memberikan kontribusi yang signifikan terhadap belanja daerah, namun pada daerah dengan IKFD tinggi, IKFD sedang, IKFD rendah dan IKFD sangat rendah kontribusinya lebih kecil dibandingkan dengan dana transfer dari pusat. Hal ini berimplikasi pada pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang belum mencapai kemandirian dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Anggi Aulia Rahma, 2018), (Dewi, 2017), (Sidiq, 2016) dan (Heryana, 2014) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki korelasi positif yang signifikan dengan belanja daerah. Selain itu, dapat diartikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan kapasitas belanja daerah. Selain itu, penguatan PAD di kabupaten/kota mengurangi beban pajak pemerintah pusat atas dana transfer dan otonomi fiskal berpotensi meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah.

Pengaruh unconditional grant perkapita (X2) terhadap belanja daerah (Y) pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Hasil estimasi data menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara tranfer tanpa syarat (unconditional transfer) dengan tingkat belanja per kapita kabupaten/kota di Indonesia. Artinya, semakin besar dana transfer tanpa syarat yang diterima oleh sebuah kabupaten/kota, maka semakin tinggi pula belanja daerah per kapita daerah tersebut. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa peningkatan transfer tanpa syarat dari pemerintah pusat ke daerah dapat meningkatkan belanja daerah kabupaten/kota pada semua kategori IKFD. Namun, pada daerah dengan PAD per kapita yang lebih tinggi, hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai regresi transfer tanpa syarat lebih rendah dibandingkan dengan nilai regresi PAD perkapita.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Anggi Aulia Rahma, 2018), (Sidiq, 2016), (Jesika & Satrianto, 2019) dan (Octaviana, 2022), yang menyatakan bahwa unconditional grant memiliki hubungan yang positif signifikan dengan belanja daerah. Hal ini berarti apabila unconditional grant ditingkatkan maka belanja daerah juga akan meningkat.

Pengaruh belanja daerah tahun sebelumnya perkapita atau LAGBD (X3) terhadap belanja daerah (Y) pemerintah kabupaten/kota di Indonesia

Variabel LAGBD atau belanja daerah per kapita tahun sebelumnya dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dalam artian jika LAGBD meningkat maka akan menyebabkan peningkatan belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penganggaran belanja masih berpatokan pada penganggaran tahun sebelumnya,

sehingga tidak ada inovasi atau ide-ide baru dalam pembangunan daerah. Menurut hasil estimasi berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, LAGBD memiliki hubungan yang positif dan signifikan kecuali pada daerah yang memiliki Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang sangat tinggi. Koefisien regresi sebesar 0.029450 dengan probabilitas sebesar 0.6113. Probabilitas >0,05 menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang sangat tinggi memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran yang baik, sehingga tidak lagi menggunakan penganggaran tradisional.

Fenomena *Flypaper Effect* pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia
Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Kab/Kota berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

| Variabel | IKFD sangat tinggi | IKFD Tinggi | IKFD Sedang | IKFD Rendah | IKFD Sangat Rendah |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C | 2.779336 | 0.959400 | 0.202556 | 0.673599 | 0.0025 |
| PAD (Signifikansi) | 0.349257 (0.0000) | 0.147625 (0.0000) | 0.044596 (0.0000) | 0.083860 (0.0000) | 0.071140 (0.0000) |
| UG (Signifikansi) | 0.279985 (0.0000) | 0.459585 (0.0000) | 0.366015 (0.0000) | 0.726185 (0.0000) | 0.777951 (0.0000) |
| LAGBD (Signifikansi) | 0.029450 (0.6113) | 0.292095 (0.0000) | 0.580788 (0.0000) | 0.130305 (0.0000) | 0.125379 (0.0003) |
| R-squared | 0.993408 | 0.992832 | 0.988958 | 0.991802 | 0.996585 |
| F-statistic | 567.5171 | 536.6881 | 349.2138 | 4743.6615 | 1139.579 |
| Prob(F-statistic) | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.000000 |

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 10, 2024

Keterangan:(***Signifikan pada level 1%)(**Signifikan pada level 5%)(*Signifikan pada level 10%)

Hasil estimasi pada Tabel 2 menunjukkan aspek tata kelola keuangan di 508 kabupaten/kota di Indonesia. Hasil uji regresi linier terhadap indeks kapasitas fiskal daerah untuk masing-masing daerah menunjukkan bahwa hanya daerah dengan indeks kapasitas fiskal daerah yang sangat tinggi terbebas dari flypaper effect, yaitu koefisien regresi variabel PAD (0,349257) per kapita lebih besar daripada variabel transfer tanpa syarat (0,279985). Flypaper effect terjadi ketika koefisien regresi PAD per kapita lebih kecil dari bantuan tanpa syarat per kapita. Dari 508 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 45 kabupaten/kota yang terbebas dari flypaper effect dan diklasifikasikan sebagai daerah mandiri.

Daerah yang tergolong dalam kategori IKFD tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah menunjukkan kondisi yang berbeda, yang mengindikasikan bahwa tata kelola fiskal daerahnya terkena flypaper effect. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah belum mampu memaksimalkan potensi daerahnya dan terus meminta bantuan kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer. Kondisi daerah yang menjelaskan terjadinya flypaper effect dapat dilihat dari sisi pendapatan, belanja bahkan siklus anggaran yang diterapkan pada masing-masing daerah. Dari sisi pendapatan, lebih spesifik lagi dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), daerah dengan kategori PAD tinggi dan sedang telah mampu meningkatkan potensi sumber daya ekonominya, namun insentif penerimaan PAD tidak optimal, terlalu rendah jika dibandingkan dengan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (PAD per kapita, tranfer tak bersyarat per kapita, dan belanja daerah per kapita tahun sebelumnya) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen belanja daerah (Y) kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi regresi panel terhadap 508 kabupaten/kota di Indonesia periode 2017-2021, yang kemudian dikategorikan ke dalam lima kategori berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) ditemukan bahwa flypaper effect terjadi pada kabupaten/kota dengan IKFD tinggi (94 kabupaten/kota), IKFD sedang (127 kabupaten/kota), IKFD rendah (128 kabupaten/kota), dan IKFD sangat rendah (114 kabupaten/kota). Hanya di daerah dengan IKFD sangat tinggi (45 kabupaten/kota) yang tidak ditemukan adanya flypaper effect.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan agar pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dapat mengevaluasi, mengeksplorasi dan meningkatkan seluruh potensi dan sumber daya yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah, terutama bagi daerah yang masih terkena flypaper effect, Kontrol yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap pengelolaan anggaran transfer tanpa syarat yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga dapat dimanfaatkan pada sektor-sektor produktif dengan meningkatkan belanja modal. Diharapkan bahwa penelitian di masa depan akan mengembangkan analisis flypaper effect terhadap faktor-faktor penentu yang lebih luas, misalnya, dengan mempertimbangkan faktor politik, sosial, dan geografis.

REFERENSI

- Anggi Aulia Rahma, S. (2018). Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4871>
- Badrudin, R. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
- Bailey, Stephen, J. (1995). *Public Sector Economics*.
- Dewi, S. R. (2017). Flypaper Effect, PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Journal of Accounting Science*, 1(2), 155–174. <https://doi.org/10.21070/jas.v1i2.956>
- Heryana, T. (2014). Flypaper Effect Analysis of Local Government Expenditure In Indonesia Based Vector Autoregressive (VAR). *Jurnal Wacana Kinerja* •, 17(2), 1–19.
- Kuncoro, H. (2004). Pengaruh Transfer antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 47–63. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=JOF3kWUAAAAJ&citation_for_view=JOF3kWUAAAAJ:bEWYMUwI8FkC
- Kusuma, H. (2017). Flypaper Effect: Fiscal Illusion and Bureaucratic Model. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 9(1), 27–39. <https://doi.org/10.17977/um002v9i12017p027>
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di

- Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 11, 67–80.
- Maimunah, M., & Akbar, R. (2008). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 11(1), 37–51.
- Munawar Chalil, T. (2018). The Size of Flypaper Effect in Decentralizing Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(2), 101–119. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i2.37>
- Octaviana, V. (2022). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(4), 43–55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/41053>
- Proborini Hastuti. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1).
- Puspita, D., & Hamidi, U. S. (2021). DESENTRALISASI FISKAL Dua Dekade Implementasi. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–289.
- Sidiq, M. (2016). Analisis Flypaper Effect berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. [http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/22944%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/22944/13/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/22944%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/22944/13/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)